



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

Jakarta, 23 Juli 2019

Kepada

Yth. Para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/  
Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD)  
Provinsi DKI Jakarta

di

Jakarta

**SURAT EDARAN**

**NOMOR 3/SE/2019**

**TENTANG**

**PENGGUNAAN KODE REKENING DAN KOMPONEN JASA KONSULTANSI  
PERENCANAAN DAN PENGAWASAN DALAM BELANJA MODAL PADA SATUAN  
KERJA PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PADA  
PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI  
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2020**

Menindaklanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI Nomor 07/S/XVIII.JKT-XVIII.JKT.2/05/2019 Tahun 2019 hal Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2018, dengan ini disampaikan kepada para Kepala SKPD/UKPD untuk :

1. Melakukan penganggaran atas pengadaan/pembangunan aset yang terdapat komponen :
  - a. belanja jasa konsultasi perencanaan (planning) dan pengawasan (supervisor);
  - b. belanja lainnya;
  - c. belanja jasa konsultasi perencanaan (X-1); dan
  - d. belanja pemeliharaan yang berdampak pada penambahan nilai/kapasitas/umur/bentuk aset,menggunakan kode rekening 5.2.3 Belanja Modal.
2. Menginput kode rekening dan komponen belanja pada kegiatan berkenaan sebagaimana dimaksud pada angka 1 ke dalam sistem e-Budgeting.
3. Dalam hal kode rekening dan komponen yang dibutuhkan belum tersedia dalam sistem e-Budgeting sebagaimana dimaksud pada angka 2, SKPD/UKPD mengusulkan melalui alamat website <http://apbd.jakarta.go.id>.

4. SKPD/UKPD melakukan penyusunan, perencanaan dan penganggaran program/kegiatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi.

Edaran ini untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

a.n. Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta  
Sekretaris Daerah,



*Saefullah*

Saefullah  
NIP 196402111984031002

Tembusan :

1. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta